

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Pada tanggal 22 Agustus 1945 dalam sidang PPKI, pemerintah membentuk sebuah Organisasi rakyat pejuang bersenjata yang pada waktu itu di sebut Badan Keamanan Rakyat (BKR), yang dibentuk dalam sidang PPKI tanggal 22 Agustus 1945 dan diumumkan oleh Presiden pada tanggal 23 Agustus 1945. Bahwa Badan Keamanan Rakyat (BKR) ini bukanlah tentara sebagai suatu organisasi kemiliteran yang resmi. Tetapi BKR ini hanya disiapkan untuk memelihara keamanan setempat agar tidak menimbulkan kesan bahwa Indonesia menyiapkan diri untuk memulai peperangan menghadapi Sekutu.

Garis kordinasi kepengurusan BKR ini, baik di pusat maupun di daerah berada di bawah wewenang KNIP dan KNI Daerah. Maka dari itu kepengurusan BKR ini sama sekali tidak berada di bawah perintah presiden sebagai panglima tertinggi angkatan perang. Dan juga tidak berada di bawah koordinasi menteri pertahanan. Karena BKR ini hanya disiapkan oleh pemerintah untuk memelihara keamanan setempat, supaya tidak menimbulkan kecurigaan kepada sekutu bahwa negara Indonesia telah menyiapkan diri untuk memulai peperangan dalam menghadapi tentara-tentara sekutu, yaitu Inggris dan Jepang.

Tentara sekutu di indonesia tiba dan mendarat di indonesia pada bulan september 1945. Dua divisi australia memasuki kalimantan dan indonesia timur

serta 3 divisi Inggris menduduki Jawa dan Sumatera untuk mengurus 350.000 tentara Jepang dan beberapa ratus ribu interniran Sekutu.

Sejak semula telah timbul pertengkaran-pertengkaran sengit antara Sekutu di satu pihak dan Belanda di pihak lain. Belanda ingin segera menegakkan kembali kekuasaan koloninya di Indonesia, sedangkan pihak Sekutu dengan hati-hati menghadapi persoalan Indonesia yang penuh kesulitan. Mereka masih ragu-ragu terhadap sikap tentara Jepang. Selain dari pada itu, mereka menyadari pula akan kebangkitan bangsa-bangsa Asia, yang haknya telah diakui dalam "Atlantic Charter". Lagi pula mereka sangat kekurangan pasukan untuk memelihara keamanan. (Haris, 1977:3)

Akhirnya, Badan Keamanan Rakyat (BKR) melalui dekrit Presiden tanggal 5 Oktober 1945 (hingga saat ini diperingati sebagai hari kelahiran TNI), dirubah namanya menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR).

Pada tanggal 7 Januari 1946, Tentara Keamanan Rakyat (TKR) berganti nama menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. Kemudian pada 24 Januari 1946, dirubah lagi menjadi Tentara Republik Indonesia. Karena saat itu di Indonesia terdapat beberapa barisan-barisan bersenjata lainnya di samping Tentara Republik Indonesia (TRI), maka pada tanggal 5 Mei 1947, Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan untuk mempersatukan Tentara Republik Indonesia dengan barisan-barisan bersenjata tersebut menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Penyatuan itu terjadi dan diresmikan pada tanggal 3 Juni 1947.

Hal ini dimaksudkan untuk menghilangkan dualisme antara tentara yang dibentuk oleh pemerintah dan badan-badan atau kelompok-kelompok perjuangan yang dibentuk diluar dari pemerintah. Dengan demikian TNI merupakan satu-satunya wadah bagi perjuangan bersenjata pada waktu itu. Sedangkan anggota-anggotanya dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada waktu itu dapat di golongkan ke dalam tiga kategori, yaitu: Pertama, Mereka yang pernah menerima pendidikan atau latihan militer dari tentara Belanda. kedua, Mereka yang pernah menerima pendidikan atau latihan militer dari tentara Jepang. Dan , Mereka yang tidak pernah menerima pendidikan atau latihan militer profesional.

Masuknya TNI sebagai kekuatan sosial politik tidak dapat dilepaskan dari sejarah lahir dan tumbuhnya TNI dalam perjuangan bangsa Indonesia. TNI lahir bersama-sama dengan meletusnya revolusi rakyat, sehingga dapat dikatakan bahwa ia lahir dari rakyat yang berjuang lahir dan tumbuh dalam perjuangan untuk merebut kembali, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan. Beranjak dari sejarah kelahiran dan pertumbuhannya, wajar jika TNI sebagai komponen bangsa juga merasa berhak dan wajib ikut menentukan haluan negara dan jalannya pemerintahan. Pemikiran inilah yang pada awalnya mendasari Dwifungsi ABRI/TNI, yakni sebagai kekuatan militer (pertahanan dan keamanan) yang merupakan alat negara, sekaligus kekuatan sosial politik yang merupakan alat perjuangan rakyat.

Tumbuh, berkembang, dan eksisnya Dwifungsi ABRI/TNI bukan saja dikarenakan faktor historis semata, tetapi juga karena didukung oleh tuntutan kondisional bangsa sehingga diperkuat pula dengan landasan-landasan

konstitusional. Yang patut dicatat, masuknya ABRI/ TNI dalam politik pada umumnya didasari oleh kondisi sistem sosial yang cenderung mengalami disfungsi, bahkan malfungsi. Dalam kondisi demikian, ABRI/TNI kemudian terlibat dalam kehidupan sosial politik dengan fungsi ekstranya. (Basuki. 2014: Vol 19 No 2).

Runtuhnya rezim Orde Baru tahun 1997 seiring dengan lengsernya Presiden Soeharto, telah memunculkan era yang berusaha mereformasi tata kelola penyelenggaraan pemerintahan negara, antara lain memperbaiki dan memperbarui sistem ketatanegaraan yang mengandung banyak kelemahan dalam penyelenggaraan pemerintahan pada era sebelumnya. Reformasi terhadap kehidupan ketatanegaraan itu antara lain dilakukan dengan merubah beberapa ketentuan dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang dinilai mengandung kelemahan dalam rangka menata kehidupan kenegaraan modern yang lebih baik. Dalam kurun waktu 4 (empat) tahun usia reformasi, MPR RI telah berhasil merubah ketentuan dalam UUD NRI 1945 sebanyak 4 (empat) kali Perubahan itu dilakukan masing-masing pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002.

Mulai dari masa revolusi kemerdekaan sampai sekarang Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak pernah absen dari keterlibatan dan peran aktifnya dalam mengembangkan dalam mengembangkan Republik. Dalam perkembangannya terus mengalami metamorfosis seiring dengan perkembangan republik dari mulai berbentuk laskar-laskar perjuangan, Badan Keamanan Rakyat (BKR), Tentara Keamanan Rakyat (TKR), tentara rakyat Indonesia (TRI), sampai pada akhirnya

menjadi TNI, ABRI dan kembali lagi pada TNI. Perkembangan ini bahwa dalam tubuh TNI terjadi dinamika yang menyangkut peran dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan dan tantangan bangsa Indonesia, ini bagian dari proses pembentukan jati diri TNI.

Peranan dan kondisi TNI AD sebagai bagian integral dari TNI pada saat ini dan yang akan datang tidak dapat terlepas dari peranan dan kondisi pada waktu sebelumnya, bahkan pada waktu di lahirkannya. Perkembangan organisasi, alat-peralatan doktrin dan peranannya selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman, namun jati dirinya yaitu TNI sebagai tentara rakyat, tentara pejuang dan tentara nasional tetap tidak berubah.

Sejarah perjalanan TNI dan eksistensi perjuangannya menjadi sebuah fenomena menarik untuk di kaji. Minimnya penulisan sejarah mengenai perjuangan Tentara Nasional Indonesia dari awal proklamasi kemerdekaan Indonesia hingga sampai sekarang ini merupakan alasan lain mengapa penelitian ini perlu untuk dilakukan. Oleh karena itu peneliti dengan judul **“TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) DALAM DINAMIKA SEJARAH INDONESIA (1945-1998)”**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi identifikasi masalah adalah :

1. Sejarah terbentuknya Tentara Nasional Indonesia.
2. Perubahan dan eksistensi Tentara Nasional Indonesia.

3. Perkembangan Tentara Nasional Indonesia mulai dari Orde lama, Orde baru hingga masa Reformasi.

1.3. Pembatasan Masalah

Sebagaimana uraian pada latar belakang masalah bahwa kajian tentang sejarah perjalanan Tentara Nasional Indonesia ini memiliki kajian yang relatif luas. Oleh karena itu, peneliti merasa perlu membuat pembatasan masalah agar dapat lebih terarah dan fokus. Maka peneliti memfokuskan pada sejarah awal terbentuknya Tentara Nasional Indonesia, eksistensi nya dalam masyarakat serta peranannya pada masa Orde Lama, Orde Baru serta pada masa Reformasi.

1.4. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sejarah awal terbentuknya Tentara Nasional Indonesia (TNI) ?
2. Bagaimana eksistensi Tentara Nasional Indonesia (TNI) ?
3. Bagaimana perkembangan Tentara Nasional Indonesia pada masa Orde Lama, Orde Baru, Era Reformasi?

1.5. Tujuan Penelitian

Menetapkan tujuan penelitian merupakan hal yang sangat penting, karena setiap penelitian yang dilakukan harus memiliki tujuan tertentu. Dengan demikian yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana sejarah awal pembentukan Tentara Nasional Indonesia (TNI).
2. Untuk mengetahui bagaimana eksistensi Tentara Nasional Indonesia (TNI) juga keberadaan serta peran nya dalam masyarakat Indonesia.

3. Untuk mengetahui perkembangan Tentara Nasional Indonesia (TNI) mulai dari masa Orde Lama, Orde Baru hingga Masa Reformasi.

1.6. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin diperoleh sesudah melaksanakan penelitian ini adalah :

1. Menambah wawasan bagi peneliti dan pembaca mengenai Tentara Nasional Indonesia (TNI)
2. Untuk menambah pengetahuan atau informasi bagi para pembaca baik dari kalangan mahasiswa maupun masyarakat umum tentang sejarah Tentara Nasional Indonesia (TNI).
3. Memperkaya informasi bagi masyarakat, untuk mengetahui Sejarah Tentara Nasional Indonesia (TNI).
4. Memperkaya informasi bagi akademisi UNIMED, khususnya jurusan Pendidikan Sejarah untuk dapat kiranya mengetahui dan memahami mengenai Sejarah
5. Sebagai bahan masukan dan perbandingan bagi peneliti lain yang bermaksud mengadakan penelitian dalam masalah yang sama.
6. Menambah daftar bacaan kepustakaan ilmiah UNIMED khususnya Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Pendidikan Sejarah.